

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan hingga 5 (Lima) tahun mendatang.

1.1.2. Fungsi

- 1) Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang
- 2) Dapat mengukur outcome yang harus dicapai
- 3) Mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya

1.1.3. Proses penyusunan Rencana Strategis

- 1) Pembentukan Tim penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Orientasi mengenai Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim
- 4) Pengumpulan Data dan Informasi
- 5)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala periode Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya untuk mencapai Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pelaksanaan Rencana Kerja, Evaluasi dan Pelaporan atas kinerja 5 (Lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 6.2. Indikator Kinerja

6.3. Sasaran

6.4. Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala melaksanakan beberapa urusan, yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM, dan Urusan Pilihan Perindustrian dan Urusan Pilihan Perdagangan.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- b. Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi
 - 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Pelaksanaan pembinaan urusan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
 - 3) Perlaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - 4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan Usaha mikro, perindustrian dan perdagangan
 - 5) Penyelesaian atas pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

2. Sekretariat Dinas

- a. Sekretariat Dinas mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, asset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - 3) Pengawasan, Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Bina Usaha Mikro
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas dibidang bina koperasi dan bina usaha mikro
 - 3) Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Bina Usaha Mikro
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang Bina Koperasi dan Bina Usaha Mikro

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Bidang Perindustrian

- a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kegiatan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Perindustrian
- b. Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang Bina Usaha Industri, dan Advokasi Industri
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas dibidang Bina Usaha Industri dan Advokasi Industri
 - 3) Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Bina Usaha Industri dan Advokasi Industri
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang sarana Bina Usaha Industri dan Advokasi Industri
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi bidang Perindustrian sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Bidang Perdagangan

- a. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Perdagangan
- b. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Distribusi Komoditas Perdagangan, Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Pengelolaan Pasar
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervise serta koordinasi atas pelaksanaan tugas dibidang Distribusi, Komoditas Perdagangan, Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Pasar

- 3) Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang Distribusi, Komoditas Perdagangan, Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Pasar
- 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang Distribusi Komoditas Perdagangan, Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Pasar
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsi Bidang Perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah data yang menggambarkan kondisi Pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel.1

Data Pegawai berdasarkan Esselon

No	Esselon	Jumlah (Org)	%
1	Esselon II	1	2,00
2	Esselon III	4	8,00
3	Esselon IV	9	18,00
4	Non Esselon (Pelaksana)	22	44,00
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	14	28,00
	Jumlah	50	100,00

Tabel.2

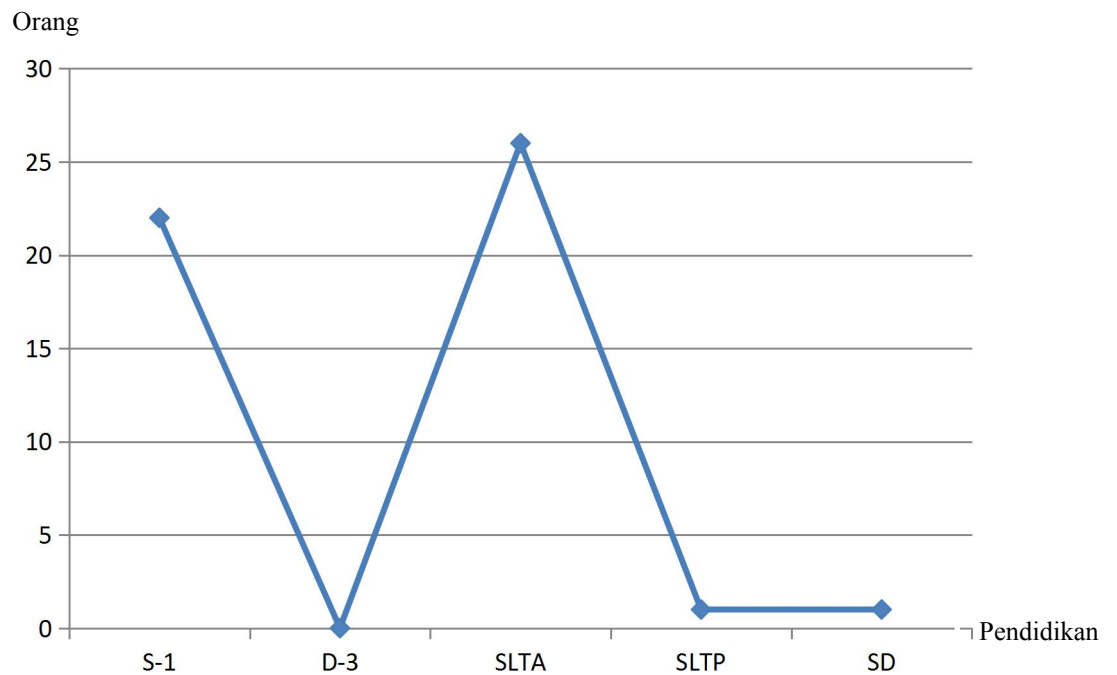
Data Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Org)	%
1	S-2	-	0,00
2	S-1	22	44,00
3	D-3	-	0,00
4	SLTA	26	52,00

5	SLTP	1	2,00
6	SD	1	2,00
	Jumlah	50	100,00

Grafik.1

Grafik Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



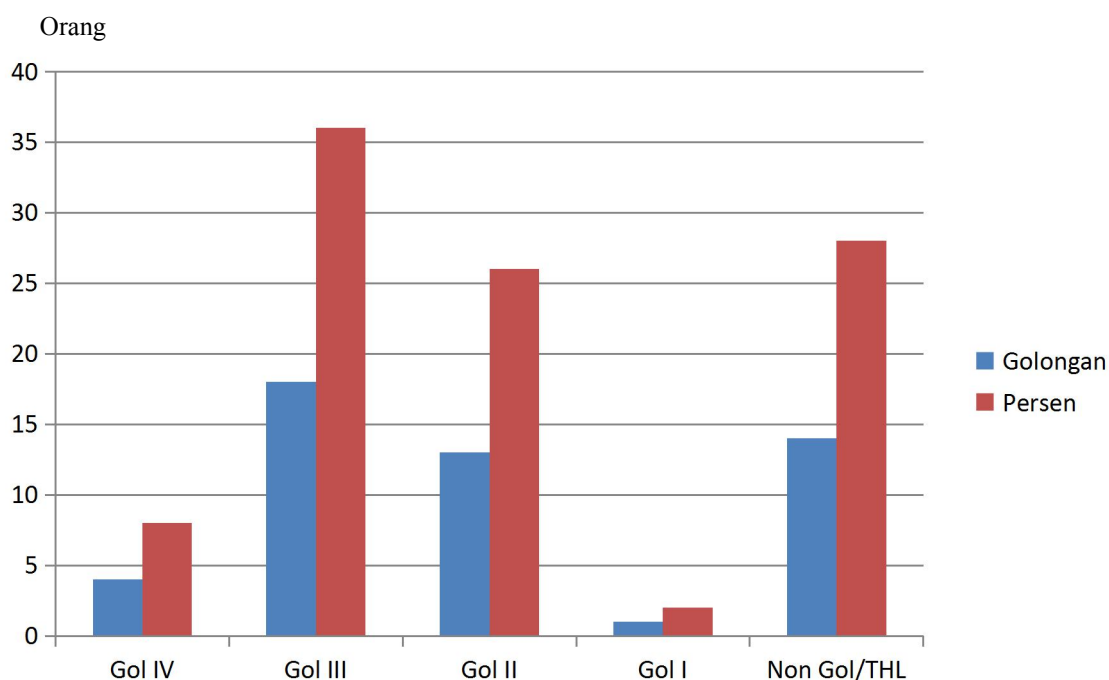
Tabel.3

Data Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Org)	%
1	Golongan IV	4	8,00
2	Golongan III	18	36,00
3	Golongan II	13	26,00
4	Golongan I	1	2,00
5	Non Golongan (THL)	14	28,00
	Jumlah	50	100,00

Grafik. 2

Grafik Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Esselon

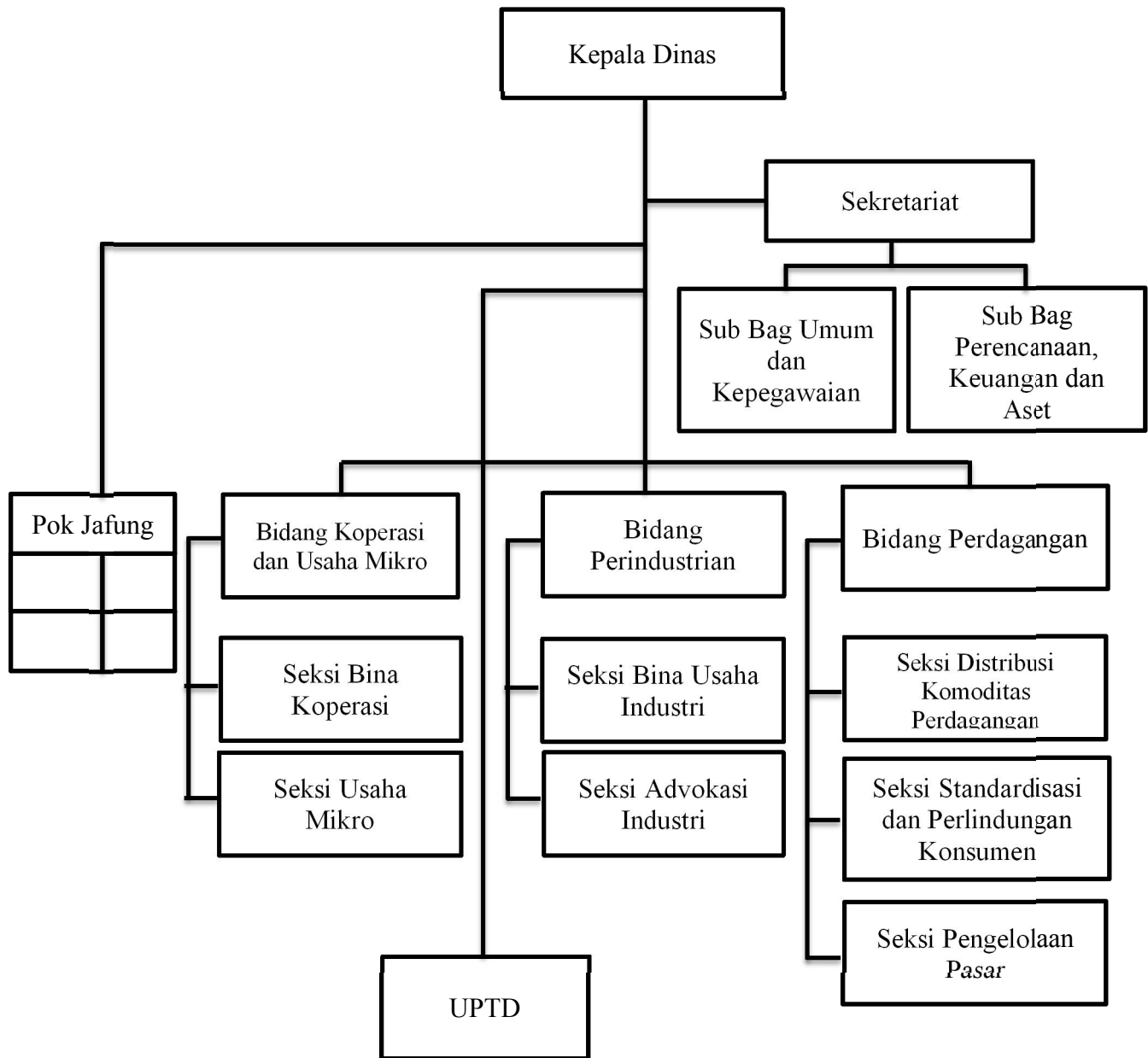


Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 50 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 14 orang, dan non struktural dan THL berjumlah 36 orang. Pegawai Struktural terdiri dari pejabat Esselon II sebanyak 1 orang, Pejabat Esselon III sebanyak 4 orang dan Pejabat Esselon IV sebanyak 9 orang.

Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan Strata Dua (S-2) tidak ada, lulusan Strata Satu (S-1) sebanyak 22 orang, lulusan Diploma Tiga (D-3) tidak ada, lulusan SLTA sebanyak 26 orang, lulusan SLTP sebanyak 1 orang dan lulusan Sekolah Dasar 1 orang.

Jumlah Pegawai berdasarkan golongan, terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 18 orang, Golongan III sebanyak 13 orang, Golongan I sebanyak 1 orang dan Non Golongan (THL) sebanyak 14 orang.

Gambar. 1
2.2.2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan



2.2.3. Kondisi Umum Sarana Kerja / Aset

Tabel. 4

Sarana dan Prasarana Kerja / Aset Dinas Kopperindag

No	Nama Barang	Satuan	Banyak
I	Gedung dan Bangunan		
	1. Kantor	Unit	1
	2. Gudang SRG	Unit	2
II	Kendaraan dan Mesin		
	1. Truk SRG	Buah	2
	2. Kendaraan Roda Empat	Buah	2
	3. Kendaraan Roda Dua	Buah	12
	4. Genset	Buah	2
III	Peralatan Kantor		
	1. Komputer / PC	Buah	7
	2. Laptop / Book Note	Buah	11
	3. Printer	Buah	10
	4. LCD	Buah	1
	5. Kamera	Buah	3
IV	Sarana Penunjang lainnya		
	1. Jaringan Internet	Unit	2
	2. Jaringan Listrik (daya)	Kwh	33.000

2.2.4. Kondisi Anggaran

Anggaran pendapatan dan Belanja (APBD) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017 telah ditetapkan dalam Penetapan Jumlah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala (termasuk DAK).

Tabel. 5
Perkembangan Anggaran Dinas Kopperindag Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan (Rp.000)	Belanja				
		Tidak langsung (Rp.000)	%	Langsung (Rp.000)	%	Total Belanja (Rp.000)
2013	330.958	2.904.206	30,40	6.646.012	69,59	9.550.218
2014	318.538	2.762.169	28,05	7.088.445	71,95	9.850.615
2015	391.448	2.982.293	21,56	10.851.259	78,44	13.833.553
2016	353.184	3.053.522	44,29	3.841.168	55,71	6.894.690
2017	353.184	2.943.017	43,47	3.827.232	56,53	6.770.017

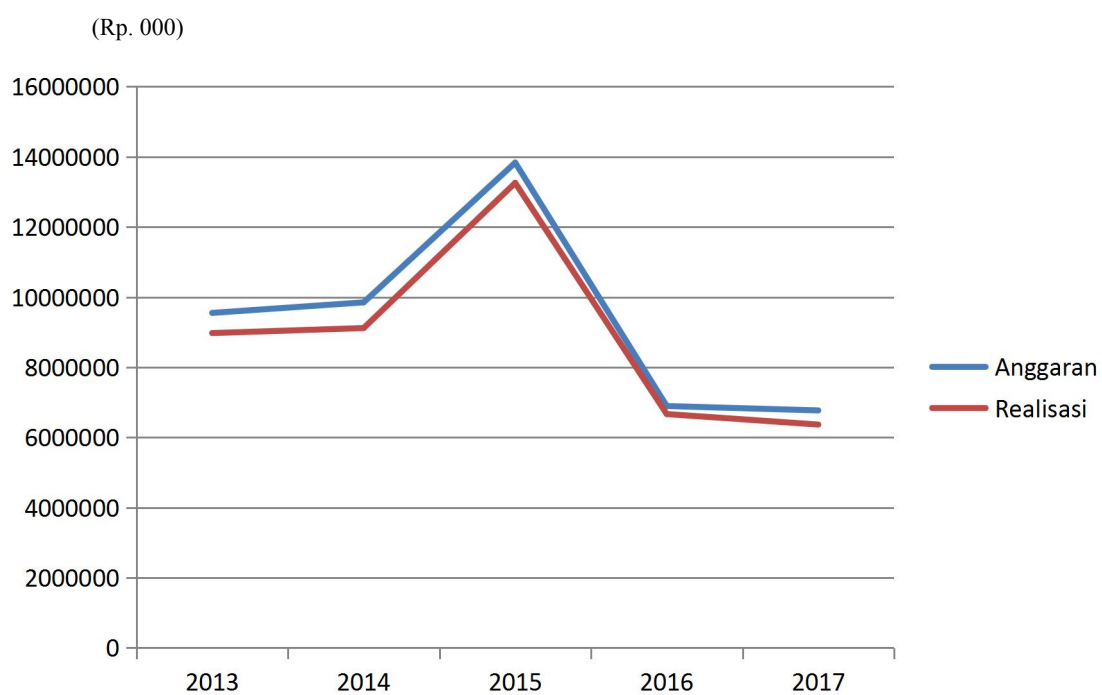
Tabel. 6
Realisasi Anggaran Dinas Kopperindag Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan (Rp.000)	Belanja					
		Tidak langsung (Rp.000)	%	Langsung (Rp.000)	%	Total Belanja (Rp.000)	%
2013	204.807	2.545.501	87,64	6.427.149	96,70	8.974.650	93,97
2014	220.385	2.700.631	97,77	6.417.403	90,53	9.118.035	92,56
2015	275.784	2.915.735	97,76	10.340.501	95,29	13.256.237	95,82
2016	307.753	2.930.993	95,89	3.735.223	97,24	6.666.217	96,68
2017	321.108	2.835.424	96,34	3.531.395	92,27	6.366.450	94,03

Dari data tersebut diatas, dari tahun ke tahun anggaran Dinas Kopperindag cenderung naik dan menurun hal tersebut disebabkan Alokasi DAK diterima Dinas Kopperindag tidak secara rutin setiap tahun.

Grafik. 3

Grafik Perkembangan Anggaran 2013-2017



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Tabel. 7

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (Lima) tahun 2013-2017 dapat dilihat pada table berikut ini :

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target Indikator Akhir Renstra	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke			
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Jumlah Koperasi aktif (Kop)	50	10	20	30	40	50	10	20	30	35	45	100	100	100	87,50
	Jumlah Koperasi yang berkualitas (Kop)	50	10	20	30	40	50	10	20	30	35	41	100	100	100	87,50
	Jumlah peserta rapat koordinasi koperasi (Kop)	240	40	80	135	185	240	40	80	120	160	200	100	100	88,89	86,48
	Jumlah peserta sosialisasi prinsip-prinsip pemahanan perkoperasian (Org)	390	150	230	310	350	390	80	120	160	200	240	53,33	52,17	51,61	57,14
	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi (Kop)	90	80	90	12	12	74	40	50	12	12	63	50,00	55,55	100	100
2	Jumlah UMKM yang memiliki legalitas	771	154	290	150	151	166	90	98	88	85	20	58,44	33,79	58,66	56,29
	Jumlah UMKM yang kondusif (Org)	1495	255	220	340	340	340	187	198	221	240	47	73,00	90,00	65,00	70,68
	Jumlah pelaku usaha peserta perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM (Org)	1495	255	475	815	1155	1495	187	385	606	846	893	73,33	81,05	74,35	73,24
	Jumlah UMKM yang berkembang (Org)	20	4	8	12	16	20	4	8	12	16	20	100	100	100	100
	Jumlah UMKM yang unggul	200	40	80	120	160	200	40	80	120	160	200	100	100	100	100
	Jumlah UMKM yang dilatih (Org)	200	40	80	120	160	200	40	80	120	160	200	100	100	100	100
	Jumlah komoditi unggulan UMKM	20	4	8	12	16	20	4	8	12	16	20	100	100	100	100
3	Prosentase industri dan IKM yang mandiri (%)	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100
	Prosentase jumlah Industri dan IKM yang dibina (%)	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100
	Jumlah produk yang berkualitas (produk)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
	Jumlah peserta IKM terlatih (Org)	27	7	14	20	20	27	7	14	20	20	27	100	100	100	100
	Jumlah buku pendataan IKM (Kec)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100	100	100	100
	Jumlah peserta pelatihan (Org)	225	15	70	125	180	255	15	70	125	180	355	100	100	100	100
4	Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	6,54	2,98	3,87	4,76	5,65	6,54	14,48	10,4	10,8	11,15	11,20	485	268	226	197
	Jumlah produk yang dipamerkan (Produk)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100
	Jumlah promosi dan kerjasama investasi (kl)	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	100	100	100	100
	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (Org)	240	60	120	180	240	240	60	120	240	240	240	100	100	100	100
5	Prosentase pasar tradisional yang reprsentatif (Unit)	19	7,89	23,68	39,47	44,73	50	7,89	23,68	39,47	44,73	52,63	100	100	100	100
	Jumlah pasar tradisional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Unit)	19	3	9	15	17	19	3	9	15	17	20	100	100	100	100
	Jumlah rehabilitasi pasar perdesaan (Unit)	19	3	9	15	17	19	3	9	15	17	20	100	100	100	100
	Jumlah peserta sosialisasi	1300	300	600	900	1200	1300	300	600	900	1200	1300	100	100	100	100

	kebijakan pengelolaan pasar (Org)																
	Jumlah peserta sosialisasi SRG (Org)	405	90	180	270	360	405	100	200	260	320	370	111,1	111,1	96,30	88,89	
	Jumlah komoditi (padi) yang disimpan dalam gudang SRG (ton)	500	500	1.000	1.500	2.000	500	312,78	600,32	884,00	1,315,66	476,06	62,56	60,03	58,93	65,78	
6	Prosentase Kec. Dalam wilayah perlindungan konsumen (Kec)	50	50	50	50	50	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	
	Jumlah pedagang pada area perlindungan konsumen (Pdg)	650	150	350	450	500	650	110	220	335	450	565	73,33	62,85	74,44	90,00	
	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen (Org)	350	50	150	150	350	350	50	150	250	350	350	100	100	100	100	
	Jumlah harga bahan pokok yang dimonitoring (item)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	
	Jumlah barang/produk strategis yang diawasi (jenis)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	
	Jumlah peserta rapat koordinasi distribusi LPG (Org)	50	0	0	100	100	50	0	0	100	100	50	0	0	100	100	
	Jumlah peserta sosialisasi kemetrolagian (Org)	240	0	60	120	180	240	0	50	115	180	240	0	83,33	95,83	100	

Dari data tersebut diatas, target kinerja selama 5 (Lima) tahun pada umumnya telah tercapai, hanya beberapa indikator program dan kegiatan yang belum tercapai 100%

Tabel. 8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama	8.974.650	9.118.035	13.256.237	6.666.217	6.366.450	8.219.908	8.439.653	12.702.126	6.444.853	5.986.372	93,97	92,56	95,82	96,68	94,03	(2.608.200)	(29,06 %)
Peningkatan jumlah peran, pemberdayaan koperasi umkm, industri perdagangan dalam perekonomian daerah																	
	8.974.650	9.118.035	13.256.237	6.666.217	6.366.450	8.219.908	8.439.653	12.702.126	6.444.853	5.986.372	93,97	92,56	95,82	96,68	94,03	(2.608.200)	(29,06 %)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Kajian terhadap kondisi riil perkembangan pembangunan sector Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa **SWOT** (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang meliputi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan.

Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, baik internal maupun eksternal, lingkungan internal yang meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), lingkungan eksternal meliputi peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). Berikut ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisa SWOT.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN / *STRENGTHS* (S)

a. Koperasi dan Usaha Mikro

- 1) Animo masyarakat berkoperasi masih tinggi, banyaknya usaha mikro disemua sektor ekonomi masyarakat.
- 2) Banyaknya masyarakat yang ingin membentuk Koperasi, khususnya adanya perusahaan sawit maupun plasma yang melibatkan Koperasi.
- 3) Kebijakan Pemerintah Daerah yang menggunakan Lembaga Koperasi sebagai penyalur pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi kepada petani.

b. Perindustrian

- 1) Animo masyarakat masih tinggi untuk berusaha dibidang industri, khususnya industri rumah tangga.
- 2) Kebutuhan masyarakat akan hasil industri olahan, baik pangan maupun non pangan.

c. Perdagangan

- 1) Tingginya kebutuhan masyarakat melalui sektor perdagangan.
- 2) Ketergantungan masyarakat terhadap pelaku pasar.
- 3) Distribusi barang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat.

KELEMAHAN / WEAKNESSES (W)

- a. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
 - 1) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi
 - 2) Terhambatnya sumber daya pembina Koperasi
 - 3) Pengelolaan Usaha Mikro Kecil secara tradisional
- b. Perindustrian
 - 1) Terbatasnya sumber daya bahan baku industri, khususnya industri berskala besar
 - 2) Masih rendahnya kualitas kemasan produk Industri Kecil Menengah.
- c. Perdagangan
 - 1) Masih terbatasnya sarana distribusi perdagangan yang memadai
 - 2) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia pelaku pasar (Pengelola dan Pedagang)
 - 3) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan sebagai Penera Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG / OPPORTUNITIES (O)

- a. Komitmen Pemimpin Daerah dalam pengembangan sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
- b. Dukungan Pemerintah Pusat dalam pengembangan sarana distribusi perdagangan melalui Alokasi Dana Alokasi Khusus
- c. Kepedulian masyarakat dalam pengembangan koperasi dan Usaha Mikro
- d. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah kabupaten melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- e. Adanya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar fungsi baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

ANCAMAN / *THREATS* (T)

- a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan kurang meningkat
- b. Banyaknya Koperasi yang tidak aktif
- c. Penggunaan Alat Ukur Takar Timbang Perlengkapannya yang tidak Standar (tidak ditera ulang)
- d. Bahan baku industri pengolahan semakin berkurang

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB II), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan beberapa urusan, baik wajib maupun pilihan, yaitu urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan, rumusan isu-isu strategi sebagai berikut :

- a. Kurang berkembangnya koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah;
- b. Belum optimalnya Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian masyarakat;
- c. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

3.2. Visi, Misi dan Program Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 adalah **“TERWUJUDNYA KOPERASI KUAT YANG DIDUKUNG OLEH USAHA MIKRO KECIL UNGGUL, INDUSTRY DAERAH YANG BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN PERDAGANGAN YANG KONDUSIF UNTUK MENDUKUNG BATOLA SETARA.)”**, adapun misiya adalah :

- 1) Merevitalisasi kelembagaan koperasi sebagai pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan peran koperasi dalam usaha mikro kecil dalam perekonomian daerah.
- 3) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola koparesi dan usaha mikro kecil.
- 4) Mengembangkan industri kecil dan menengah.
- 5) Menumbuh dan mengembangkan sentra sentra industri.
- 6) Meningkatkan daya saing industry melalui penguatan teknologi dan industry.

- 7) Meningkatkan system distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya serta pengembangan pasar produk dalam negeri.
- 8) Meningkatkan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen.
- 9) Meningkatkan operasionalisasi dan pengembangan kemetropolitan.

Dari misi tersebut diatas, yang terkait dengan MISI Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Misi kedua, yaitu : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui inovasi teknologi berbasis pertanian, dari misi tersebut sasaran yang ingin dicapai :

- 1) Meningkatnya Budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian ;
- 2) Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat ;
- 3) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan mengembangkan potensi lokal.

Sasaran yang terkait dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah sasaran kedua, yaitu : Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat, dengan indikator :

- 1) Indeks Gini ;
- 2) Produk Domestik Regional Bruto Perkapita.

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala melaksanakan beberapa urusan, untuk tingkat pusat terdapat tiga Kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan merupakan tahun ke-empat periode Rencana Strategis Kementerian, yaitu periode tahun 2015-2019.

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

Program dan Sasaran Program Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan : Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
- 2) Sasaran : 1) Meningkatkan kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam perekonomian

- 2) Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah
- 3) Meningkatkan usaha baru bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 4) Meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi.

3) Program dan Sasaran Program :

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan sasaran program meningkatnya efektivitas manajemen Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan sasaran program meningkatnya dukungan sarana prasarana Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 3) Program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, dengan sasaran program meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia usaha mikro dalam menjalankan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
- 4) Program peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dengan sasaran program meningkatnya daya saing dan kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam perekonomian
- 5) Program penguatan kelembagaan Koperasi, dengan sasaran program meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi.

2. Kementerian Perindustrian

Program dan Sasaran Program Renstra Kementerian Perindustrian periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Program : Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri
- Sasaran program : Terbangunnya 7 kawasan industri (KI) dan 11 Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) di Sumatera dan Kalimantan

- 2) Program : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan aneka
- Sasaran program : 1) Meningkatnya populasi industri sedang dan besar Tekstil dan aneka
- 2) Revitalisasi Industri Tekstil dan aneka
- 3) Program : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro
- Sasaran program : 1) Meningkatnya populasi industri sedang dan besar hasil hutan dan perkebunan
- 2) Meningkatnya daya saing industri hasil hutan dan perkebunan
- 4) Program : Penumbuhan dan Pengembangan Industri alat transportasi, mesin elektronik dan alat pertahanan
- Sasaran program : 1) Meningkatnya daya saing industri alat transportasi darat
- 2) Tersedianya kendaraan angkutan umum murah
- 3) Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industri intermediate dan industri hilir
- 5) Program : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Sasaran program : Meningkatnya fasilitas pengembangan produk Industri Kecil Menengah
- 6) Program : Pengamanan Industri dan kerjasama internasional
- Sasaran program : Terbantunya industri dalam negeri dari dampak, kebijakan regulasi, iklim usaha dan pengaruh persaingan global
- 7) Program : Pengembangan Teknologi dan kebijakan industri
- Sasaran program : Meningkatnya apresiasi terhadap produk industri dalam negeri

3. Kementerian Perdagangan

Program dan Sasaran Program Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Program : Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Sasaran program :
 - 1) Meningkatkan pemanfaatan data / informasi perdagangan dan terkait perdagangan
 - 2) Meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian
 - 3) Tersedianya rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - 4) Tersedianya data dan informasi perdagangan yang tepat guna
 - 5) Tersedianya jaringan TIK yang stabil guna mendukung layanan publik dan internal kementerian perdagangan
- 2) Program : Pengembangan Perdagangan dalam negeri
Sasaran program :
 - 1) Kontribusi Produk Domestik Bruto Sub Sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto Nasional tanpa migas
 - 2) Pengembangan kapasitas logistik dan sarana perdagangan
 - 3) Peningkatan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah
 - 4) Menurunnya Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah
 - 5) Menurunnya Koefisien Variasi harga kebutuhan pokok antar waktu
 - 6) Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

- 7) Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha bidang perdagangan dalam negeri
- 3) Program : Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
- Sasaran program : 1) Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa
- 2) Meningkatnya efektivitas penyaluran impor
- 3) Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha bidang perdagangan luar negeri
- 4) Program : Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- Sasaran program : 1) Pengembangan sektor prioritas jasa yang berorientasi ekspor
- 2) Penurunan hambatan tarif dan non tariff di negeri mitra
- 3) Peningkatan implementasi hasil perundingan
- 4) Pengamanan kebijakan nasional di Fora Internasional
- 5) Kepastian tindak lanjut dan peta kerjasama perdagangan internasional
- 6) Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional
- 5) Program : Pengembangan Ekspor Nasional
- Sasaran program : 1) Meningkatnya pertumbuhan barang ekspor non migas yang bernilai tambah dan jasa
- 2) Meningkatnya diverifikasi pasar dan produk ekspor

- 3) Meningkatnya promosi citra produk ekspor (*nation branding*)
- 4) Optimalnya kelembagaan ekspor
- 6) Program : Peningkatan Perdagangan berjangka komoditi
 - Sasaran program : Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan pasar lelang
- 7) Program : Peningkatan Perlindungan Konsumen
 - Sasaran program :
 - 1) Meningkatnya pemberdayaan konsumen
 - 2) Meningkatnya ketertelusuran mutu barang
 - 3) Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku
 - 4) Meningkatnya tertib ukur
 - 5) Meningkatnya Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) terdaftar yang mematuhi peraturan
 - 6) Meningkatnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan public

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usah Kecil Menengah, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala melaksanakan beberapa urusan yang diampu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usah Kecil Menengah, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu periode Tahun 2016-2021

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil ;

- 2) Meningkatkan capaian, skala dan produktifitas usaha koperasi dan usaha kecil ;
 - 3) Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha kecil.
- b. Sasaran strategis :
- 1) Meningkatkan kontribusi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis Koperasi/Sentra di sektor-sektor unggulan;
 - 2) Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
 - 3) Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan ;
 - 4) Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktik berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.
- c. Sasaran jangka menengah :
- 1) Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha kecil ;
 - 2) Meningkatnya cakupan, skala dan produktifitas usaha koperasi dan usaha kecil ;
 - 3) Berkembangnya kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan usaha kecil.
2. Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
- Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
- a. Tujuan :
- 1) Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dan jasa berbasis sumber daya lokal ;
 - 2) Daya saing industri yang kuat melalui pengembangan teknologi dan inovasi.
- b. Sasaran :
- 1) Meningkatnya kontribusi sektor industri ;
 - 2) Peningkatan dan pengembangan industri kecil dan menengah ;
 - 3) Pengembangan kelembagaan/sentra industri potensial ;
 - 4) Peningkatan kemampuan teknologi industri.

3. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan :

Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode Tahun 2016-2021 :

a. Tujuan :

Meningkatkan daya saing perekonomian.

b. Sasaran :

Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa.

c. Strategi dan kebijakan :

1) Perdagangan Dalam Negeri :

- Arah kebijakan :
 - Mewujudkan perdagangan domestik yang kuat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi kelancaran distribusi barang dan kegiatan jasa perdagangan ;
 - Peningkatan efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri ;
 - Peningkatan pengawasan barang beredar di pasar secara berkala dan khusus.
- Strategi :
 - Peningkatan efisiensi dan distribusi serta pengembangan sarana/prasarana perdagangan untuk memperlancar arus distribusi (terutama bahan pokok)
 - Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan usaha perdagangan antara pusat dan daerah ;
 - Pengamanan pasar dalam negeri melalui peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

2) Perdagangan Luar Negeri

- Arah kebijakan :
 - Kinerja ekspor dan iklim usaha perdagangan luar negeri ;
 - Penguatan daya saing dan akses pasar luar negeri.
- Strategi :
 - Mengembangkan Sumber Daya Manusia terutama Usaha Kecil Menengah yang diarahkan untuk mencapai pengusaha mandiri dan profesional ;

- Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan dan arus dokumen ekspor dan import ;
- Mengembangkan dan menguatkan sumber daya informasi dan memperluas kerjasama dan koordinasi ;
- Menggali dan mengembangkan ragam produk ekspor dan meningkatkan daya saing serta mempromosikan pada pameran dagang internasional ;
- Peningkatan permodalan pasar-pasar Negara mitra baru seperti Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur serta memulihkan dan memperkuat pasar tujuan utama / pasar rakyat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan penataan ruang kabupaten Barito Kuala sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan adalah “Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengembangkan potensi wilayah”.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut diatas, rencana struktur ruang Kabupaten Barito Kuala meliputi pusat-pusat kegiatan, dan sistem jaringan prasarana utama dan jaringan prasarana lainnya, hal ini dapat dilihat dari :

- a. Rencana Pusat Pertokoan ;
- b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi ;
- c. Rencana Sistem Jaringan Energi ;
- d. Rencana Sitem Jaringan Telekomunikasi ;
- e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dan
- f. Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala jika dilihat dari perspektif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Penataan Ruang, terdiri atas :
 - a. Pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan terbentuknya Agro industri ;

- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan dan jasa.
- 2) Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan industri besar ;
 - b. Kawasan peruntukan industri sedang, dan
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil / rumah tangga.
- 3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan, disusun dengan memperhatikan :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang mendukung kegiatan pasar, seperti pengembangan kantor jenis Bank, Koperasi dan sejenisnya ;
 - b. Pada kawasan ini diperkenankan bersyarat pembangunan Ruko dengan intensitas rendah ;
 - c. Pada kawasan ini diperkenankan dikembangkan perkantoran dan perumahan dengan memperhatikan jarak dengan kawasan pertokoan lokal.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen kajian lingkungan hidup strategis Tahun 2017 – 2021 yang terkait dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

3.5.1 Isu Strategis :

- 1) Potensi Tabung Gas Metan lebih dari 70 % diwilayah Kabupaten Barito Kuala ;
- 2) Meningkatnya angka pengangguran, baik kurang tersedia lapangan kerja maupun menurunnya lapangan kerja tersedia (Penutupan Industri Kayu);
- 3) Persaingan ekonomi regional;
- 4) Tingkat pelayanan fasilitas social dan ekonomi (Rumah Sakit, Terminal, Perkantoran Pemerintah, Pendidikan, Peribadatan, Pasar) belum optimal;

3.5.2 Kebijakan/Rencana Program :

- 1. RTRW hanya menyebutkan bahwa Barito Kuala memiliki potensi Gas Metan (CBM) belum memberikan rambu-rambu atau pengaturan terhadap eksplorasi dan eksploitasi Gas Metan.
- 2. Rencana pola ruang RTRW menjadikan banyak ruang untuk kegiatan budidaya ruang untuk kegiatan budiday, baik primer (sector produksi) hingga ke skunder (sektor pengolahan) yaitu adanya kawasan industr.
- 3. Dalam pengembangan ekonomi regional, RTRW berbasis pengembangan sektor primer dan sekunder (produksi - pengolahnya).
- 4. Peningkatan perkotaan seperti promosi PKLp merupakan acuan bagi peningkatan standar pelayanan perkotaan.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

- a. Kurang berkembangnya koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah;
- b. Belum optimalnya Industri Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Masyarakat;
- c. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

4.1.1 Tujuan RPJMD

Tujuan 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya

4.1.2 Tujuan Renstra

- 1) Mengembangkan peran koperasi, UMKM sebagai pelopor pemasar produk olahan dan kerajinan ;
- 2) Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal ;
- 3) Peningkatan kualitas pasar daerah dan pasar desa.

4.1.3 Sasaran RPJMD

Misi 2. Sasaran 2. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat

4.1.4 Sasaran Renstra

- 1) Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro ;
- 2) Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat ;
- 3) Meningkatnya sarana distribusi perdagangan.

4.1.5 Indikator Kinerja SKPD

4.1.5.1 IKU PEMDA

- 1).Indeks Gini (misi 2, indikator 2)
- 2).PDRB Perkapita (misi 2, indikator 3)

4.1.5.2 IKU SKPD

- 1). Prosentase koperasi yang berkualitas ;
- 2).Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil ;
- 3).Prosentase kelompok perngrajin yang berkualitas ;
- 4).Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk periode Tahun 2017-2022 tidak membuat Visi dan Misi, yang ada hanya Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu :

4.2.1 Visi

Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (BATOLA SETARA)

4.2.2 Misi

Untuk mencapai Visi tersebut terdapat Empat misi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan adalah misi kedua, yaitu “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi teknologi berbasis Pertanian”.

4.2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

4.2.3.1 Tujuan :

- 1) Mengembangkan peran koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai pelopor pemasar produk olahan dan kerajinan ;
- 2) Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis pertanian lokal ;

4.2.3.2 Peningkatan kualitas Pasar Daerah dan Pasar Desa.Sasaran :

- 1) Meningkatnya peran koperasi dan Usaha Mikro ;
- 2) Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian masyarakat ;
- 3) Meningkatnya sarana distribusi perdagangan.

Tabel. 9

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mengembangkan peran koperasi, UMKM sebagai pelopor pemasar produk olahan dan kerajinan	1. Persentase Koperasi Yang berkualitas	$\Sigma \text{Koperasi Berkualitas dibagi } \Sigma \text{ seluruh Koperasi dikali } 100$	1. Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro.	1. Persentase koperasi yang berkembang modal sendiri omset dan SHUnya.	$\Sigma \text{ koperasi yang berkembang dibagi } \Sigma \text{ seluruh koperasi dikali } 100\%$	35,00	36,66	38,33	40,00	41,66
		2. Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	$\Sigma \text{ Usaha Kecil}$		2. Jumlah pelaku usaha mikro yang dikembangkan permodalan dan omsetnya.	$\Sigma \text{ usaha mikro yang berkembang}$	490	492	494	496	498
					3. Jumlah sarana pemasaran bagi usaha mikro.	$\Sigma \text{ sarana pemasaran usaha mikro.}$	1	1	1	2	2
2.	Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi local	1. Prosentasi kelompok pengrajin yang berkualitas	$\Sigma \text{ Kelompok Pengrajin Berkualitas dibagi } \Sigma \text{ Kelompok Pengrajin dikali } 100$	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	Jumlah produk IKM yang diterima pasar.	$\Sigma \text{ produk IKM}$	8	9	9	9	9
					Jumlah sentra yang terbentuk pada wilayah kecamatan.	$\Sigma \text{ sentra}$	1	2	2	2	2
3.	Peningkatan kualitas pasar daerah dan pasar desa	1. Prosentasi pertumbuhan barang dan jasa sector perdagangan	$\Sigma \text{ Pertumbuhan Barang dan Jasa dibagi } \Sigma \text{ Barang dan Jasa Sektor Perdagangan dikali } 100$	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Presentase sarana dan prasarana yang memadai / representative.	$\Sigma \text{ sarana yang representative dibagi } \Sigma \text{ sarana dikali } 100\%$	62,16	70,27	78,37	86,48	94,59
					Presentase barang beredar yang standar.	$\Sigma \text{ barang yang standar dibagi } \Sigma \text{ barang yang beredar dikali } 100\%$	75	80	85	90	90

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

5.1.1 Strategi

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi ;
- 2) Penguatan kapasitas usaha mikro menjadi usaha kecil ;
- 3) Penguatan kapasitas Industri Kecil dan Menengah ;
- 4) Pengembangan sarana Distribusi Perdagangan.

5.1.2 Arah Kebijakan

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi ;
- 2) Pengembangan dan peningkatan kualitas usaha mikro kecil ;
- 3) Pengembangan kapasitas industri kecil dan menengah ;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan.

Tabel. 10
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (BATOLA SETARA)			
MISI : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Peran Koperasi UMKM sebagai Pelopor Kemasan Produk Olahan dan Kerajinan	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro.	Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi.	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.
		Penguatan kapasitas usaha mikro menjadi usaha kecil.	Pengembangan dan peningkatan kualitas Usaha Mikro Kecil.
Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi local.	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat.	Penguatan kapasitas Industri Kecil dan Menengah.	Pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah.
Meningkatkan kualitas pasar daerah dan pasar desa.	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Pengembangan sarana distribusi perdagangan.	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel. 11

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	P rogram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Mengembang- kan peran koperasi, UMKM sebagai pelopor pemasar produk olahan dan kerajinan.	Prosentase koperasi yang berkualitas.				33,33 %	35,00 %	36,66 %	38,33 %	40,00 %	41,66 %	41,66 %	Kepala	Kab. Batola
						Rp 170.550.000	Rp 445.470.000	Rp 246.200.000	Rp 265.160.000	Rp 286.100.000	Rp 1.413.480.000		
		2.11.2.11.01.18	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.	Meningkatnya kelembagaan koperasi.	33,33 %	56,66 %	59,16 %	61,66 %	64,16 %	66,66 %	66,66 %	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Batola
						Rp 170.550.000	Rp 445.470.000	Rp 246.200.000	Rp 265.160.000	Rp 286.100.000	Rp 1.413.480.000		
		2.11.2.11.01.18 .01	Revitalisasi pengelolaan organisasi dan keuangan koperasi.	Jumlah peserta rapat koordinasi yang memahami kebijakan program pengembangan koperasi.		15 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	135 Org	Kasi Koperasi	Kab. Batola
						Rp 109.250.000	Rp 132.750.000	Rp 146.000.000	Rp 160.600.000	Rp 176.600.000	Rp 725.200.000		
		2.11.2.11.01.18 .04	Sosialisasi Prinsip prinsip pemahaman perkoperasian.	Jumlah pengelola koprasasi yang memahami prinsip- prinsip perkoperasian		15 Org	30 Org	45 Org	60 Org	75 Org	150 Org	Kasi Koperasi	Kab. Batola
						Rp 13.800.000	Rp 36.000.000	Rp 39.600.000	Rp 43.650.000	Rp 47.900.000	Rp 180.950.000		
		2.11.2.11.01.18 .05	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.	Jumlah koperasi yang menerima penghargaan.		42 Kop	44 Kop	46 Kop	48 Kop	50 Kop	50 kop	Kasi Koperasi	Kab. Batola
						Rp 47.500.000	Rp 60.000.000	Rp 66.600.000	Rp 61.000.000	Rp 61.600.000	Rp 296.700.000		
		2.11.2.11.01.18 .10	Sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman	Prosentase koperasi yang berkembang modal sendiri		00	20 %	00	00	00	20 %	Kasi Koperasi	Kab. Batola
						00	Rp 216.720.000	00	00	00	Rp 216.720.000		

		perkoprasian (DAK non pisik)	omset dan SHU									
Jumlah usah mikro menjadi usaha kecil				488 Org	490 Org	492 Org	494 Org	496 Org	498 Org	498 Org	Kepala	Kab. Batola
					Rp 692.505.000	Rp 618.390.000	Rp 467.500.000	Rp 473.500.000	Rp 479.500.000	Rp 2.731.395.000		
	2.11.2.11.01.15	Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduusif.	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang	340 Org	340 Org	680 Org	1.020 Org	1.360 Org	1.750 Org	1.750 Org	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Batola
					Rp 246.475.000	Rp 332.720.000	Rp 294.500.000	Rp 294.500.000	Rp 294.500.000	Rp 1.462.695.000		
	2.11.2.11.01.15 .06	Perencanaan koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah.	Jumlah usaha mikro yang mampu mengembangkan permodalan dan usahanya.		5 Org	10 Org	15 Org	20 Org	25 Org	25 Org	Kasi Usaha Mikro	Kab. Batola
					Rp 33.000.000	Rp 25.200.000	Rp 27.700.000	Rp 30.500.000	Rp 33.550.000	Rp 149.950.000		
	2.11.2.11.01.15 .08	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan permodalan dan usahanya		292 Org	342 Org	392 Org	442 Org	492 Org	492 Org	Kasi Usaha Mikro	Kab. Batola
					Rp 213.475.000	Rp 307.520.000	Rp 266.800.000	Rp 264.000.000	Rp 260.950.000	Rp 1.312.745.000		
	2.11.2.11.01.16	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang.								Kabid Koperasi dan usaha mikro	Kab. Batola
					Rp 11.000.000	Rp 151.400.000	Rp 13.000.000	Rp 14.000.000	Rp 15.000.000	Rp 204.400.000		
	2.11.2.11.01.16 .06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.	Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki jiwa kewirausahaan.		15 Org	30 Org	45 Org	60 Org	75 Org	75 Org	Kasi Usaha Mikro	Kab. Batola
					Rp 11.000.000	Rp 10.120.000	Rp 13.000.000	Rp 14.000.000	Rp 15.000.000	Rp 63.120.000		
	2.11.2.11.01.16 .11	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DAK non pisik)	Jumlah pelaku usaha mikro yang dikembangkan permodalan dan omsetnya		00	75 Org	00	00	00	75 Org	Kasi Usaha Mikro	Kab. Batola
					00	Rp 141.280.00	00	00	00	Rp 141.280.00		
	2.11.2.11.01.17	Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang.								Kabid Koperasi dan usaha mikro	Kab. Batola
					Rp 435.030.000	Rp 134.270.000	Rp 160.000.000	Rp 165.000.000	Rp 170.000.000	Rp 1.064.300.000		
	2.11.2.11.01.17 .06	Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah pengadaan saranan pemasaran bagi usaha mikro.		1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Kasi Usaha Mikro	Kab. Batola
					Rp 435.030.000	Rp 134.270.000	Rp 160.000.000	Rp 165.000.000	Rp 170.000.000	Rp 1.064.300.000		
Mengembangk an kewirausahaan masyarakat	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat.				4,7 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	23,5 %	Kepala Dinas	Kab. Batola
					Rp 690.800.000	Rp 1.548.375.500	Rp 610.000.000	Rp 735.000.000	Rp 670.000.000	Rp 4.254.175.500		
	3.07 . 2.11.01 .	Program	Meningkatnya		8 Produk	5 Produk	8 produk	9 Produk	10 Produk	10 Produk	Kabid	Kab.

berbasis lokal		16	pengembangan industri kecil dan menengah	jumlah IKM yang produknya diterima pasar		Rp 606.402.000	Rp. 724.012.000	Rp 425.000.000	Rp 450.000.000	Rp 475.000.000	Rp 2.680.414.000	Perindustrian	Batola
		3.07.2.11.01.16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah produk yang diterima pasar.		8 Produk	5 Produk	8 produk	9 Produk	10 Produk	10 Produk	Kasi	Kab. Batola
						Rp 606.402.000	Rp. 724.012.000	Rp 425.000.000	Rp 450.000.000	Rp 475.000.000	Rp 2.680.414.000		
		3.07.2.11.01.16.03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah.	Jumlah penyusunan dokumen kebijakan.		00	00	00	00	00	00	Kasi	Kab. Batola
						00	00	00	00	00	00		
		3.07.2.11.01.19	Program pengembangan sentra – sentra industri potensial	Meningkatnya sentra industri potensial		Rp 84.398.000	Rp 824.363.500	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000	Rp 195.000.000	Rp 1.473.761.500	Kabid Perindustrian	Kab. Batola
		3.07.2.11.01.19.02	Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat.	Jumlah sentra yang dibina.		1 Sentra	2 Sentra	3 Sentra	4 Sentra	5 Sentra	5 Sentra	Kasi	Kab. Batola
						Rp 84.398.000	Rp 824.363.500	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000	Rp 195.000.000	Rp 1.473.761.500		
		2.07.1.15.01.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Peningkatan kemampuan teknologi industri		00	00	00	2 Produk	00	2 Produk	Kabid Perindustrian	Kab. Batola
						00	00	00	Rp 100.000.000	00	Rp 100.000.000		
		2.07.1.15.01.17.5	Fasilitasi penerapan iptek system industri	Jumlah produk inovasi kerajinan.		00	00	00	2 Produk	00	2 Produk	Kasi	Kab. Batola
						00	00	00	Rp 100.000.000	00	Rp 100.000.000		
Peningkatan kualitas pasar daerah dan pasar desa	Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sector perdagangan				00 %	0,50 %	1,00 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %	2,50 %	Kepala Dinas	Kab. Batola
						Rp 14.883.704.625	Rp 5.944.062.000	Rp 1.825.000.000	Rp 1.956.000.000	Rp 1.988.000.000	Rp 26.596766.625		
		3.06.2.11.01.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan	Persentase barang beredar yang standar.	60.00 %	75.00 %	80.00 %	85.00 %	90.00 %	90.00%	90.00 %	Kabid Perdagangan	Kab. Batola
						Rp 92.669.000	Rp 1.551.330.000	Rp 120.000.000	Rp 125.000.000	Rp 130.000.000	Rp 2.018.999.000		
		3.06.2.11.01.15.02	Penyelesaian permasalahan permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah konsumen yang cerdas memahami hak dan kewajibannya.		50 Org	100 Org	150 Org	200 Org	250 Org	250 Org	Kasi standarisasi dan PK	Kab. Batola
						Rp 28.169.000	Rp 74.462.000	Rp 57.632.000	Rp 57.169.000	Rp 56.379.000	Rp 273.811.000		
		3.06.2.11.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.	Jumlah peserta rapat koordinasi distribusi barang bersubsidi.		44 Org	50 Org	75 Org	85 Org	100 Org	100 Org	Kasi distribusi komoditas perdagangan	Kab. Batola
						Rp 49.500.000	Rp42.640.000	Rp 46.904.000	Rp 51.594.000	Rp 96.573.000	Rp 287.211.000		
		3.06.2.11.01.15.06	Kemudahan perizinan pengembangan usaha.	Jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha.		50 Org	1000 Org	150 Org	00	00	150 Org	Kasi distribusi komoditas perdagangan	Kab. Batola
						Rp 15.000.000	Rp 14.728.000	Rp 15.464.000	00	00	Rp 45.192.000		
		3.06.2.11.01.15.07	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah.	Jumlah terbentuknya unit metrology legal.		00	00	00	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kasi standarisasi dan PK	Kab. Batola
						00	00	00	Rp 16.237.000	Rp 17.048.000	Rp 33.285.000		

	3.06.2.11.01.18.07	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen (DAK)	Prosentase alat UTP yang ditera / tera ulang		00	60 %	00	00	00	60 %	Kasi standarisasi dan PK	Kab. Batola
					00	Rp 1.419.500.000	00	00	00	Rp 1.419.500.000		
	3.06.2.11.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Prosentase sarana dan prasarana yang memadai/representatif	54,05 %	62,16 % Rp 14.791.035.625	70,27 % Rp 4.340.732.000	78,37 % Rp 1.650.000.000	86,48 % Rp 1.775.000.000	94,59 % Rp 1.800.000.000	94,59 % Rp 22.708.417.625	Kabid Perdagangan	Kab. Batola
	3.06.2.11.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah revitalisasi pasar tradisional.		3 Unit Rp 5.656.035.625	6 Unit Rp 1.898.262.000	9 Unit Rp 1.421.520.000	12 Unit Rp 1.535.096.000	15 Unit Rp 1.548.100.800	15 Unit Rp. 12.059.014.425	Kasi Pengelolaan Pasar	Kab. Batola
	3.06.2.11.01.18.06	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah gabah yang direksi gudangkan.		500 Ton Rp 70.000.000	1.000 Ton Rp 217.600.000	1.500 Ton Rp 228.480.000	2.000 Ton Rp 239.904.000	2.500 Ton Rp 251.899.200	2.500 ton Rp. 1.007.883.200	Kasi distribusi komoditas perdagangan	Kab. Batola
	3.06.2.11.01.18.08	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	Jumlah revitalisasi pasar tradisional		2 unit Rp 9.065.000.000	4 unit Rp 2.224.870.000	00 00	00 00	00 00	4 unit Rp.11.289.870.000	Kasi Pengelolaan Pasar	Kab. Batola
	3.06.2.11.01.19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan yang ditata.		00 00	300 Org Rp 52.000.000	300 Org Rp 55.000.000	300 Org Rp 56.000.000	300 Org Rp 58.000.000	1200 Org Rp 221.000.000	Kabid Perdagangan	Kab. Batola
	3.06.2.11.01.19.03	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan yang di data.		00 00	300 Org Rp 52.000.000	300 Org Rp 55.000.000	300 Org Rp 56.000.000	300 Org Rp 58.000.000	1200 Org Rp 221.000.000	Kasi Pengelolaan Pasar	Kab. Batola

Tabel. 12

6.2 Program dan Kegiatan Penunjang

No	Program	No	Kegiatan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan jasa surat menyurat
		2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
		5.	Penyediaan alat tulis kantor
		6.	Penyediaan barang catatan dan pengadaan
No	Program	No	Kegiatan
		7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik
		8.	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan dan peraturan perundang undangan
		9.	Penyediaan makanan dan minuman
		10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.	Peningkatan Sasaran dan prasarana dan aparatur	12.	Pengembangan gedung listrik
		13.	Pengadaan peralatan gedung kantor
		14.	Pengadaan mebeler
		15.	Pemeliharaan rutin/berkala

			gudang kantor
		16.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		17.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18.	Pendidikan dan pelatihan formal

Tabel. 13

6.3 Kinerja Utama (KU)

No	KU Esselon II	No	KU Esselon III	No	KU Esselon IV
1	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro	1.	Meningkatnya kelembagaan koperasi	1.	Pembinaan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Penghargaan koperasi
		2.	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang modal sendiri dan omsetnya	2.	Pembinaan, Pemberdayaan, Pengembangan dan Fasilitasi Usaha Mikro
2.	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	3.	Meningkatnya jumlah IKM yang produknya diterima pasar	3.	Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri
				4.	Promosi IKM dan kerajinan
		4.	Meningkatnya sentra industri potensial	5.	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang IKM
				6.	Fasilitasi inovasi produk kerajinan
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	5.	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	7.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
				8.	Penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan

				9.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
		6.	Meningkatnya kualitas barang beredar yang standard	10.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
				11.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan/pengaduan konsumen

6.4 Indikator Kinerja

Tabel. 14

6.4.1 Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian (Tahun ke-)					Kondisi Akhir
				1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi yang berkualitas	33,33	35,00	36,66	38,33	40,00	41,66	41,66
		Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	488	490	492	494	496	498	498
2	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	Prosentase Kelompok pengrajin yang berkualitas	1,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	25,00
3	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi	Prosentase pertumbuhan barang dan jasa	0	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	2,50

	perdagangan	sektor perdagangan							
--	-------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tabel. 15

6.4.2 Indikator program (Indikator Kinerja Esselon III)

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Target Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi yang berkembang modal sendiri, omset dan SHU nya (%)	56,66	59,16	61,66	64,16	66,66
2	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang modal sendiri dan omsetnya	Jumlah pelaku usaha mikro yang dikembangkan permodalan dan omsetnya (org)	340	680	1.020	1.360	1.750
		Jumlah sarana pemasaran bagi usaha mikro (org)	1	1	1	2	2
3	Meningkatnya jumlah IKM yang produknya diterima pasar	Jumlah produk IKM yang diterima pasar (produk)	8	9	9	9	9
4	Meningkatnya sentra industri potensial	Jumlah sentra yang terbentuk pada wilayah kecamatan (sentra)	1	2	2	1	1
5	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Prosentase sarana perdagangan yang memadai/representatif (%)	62,16	70,27	78,37	86,48	94,59
6	Meningkatnya kualitas barang beredar yang standar	Prosentase barang beredar yang standar (%)	75	80	85	90	90

Tabel. 16

6.4.3 Indikator Kegiatan (Indikator Kinerja Esselon IV)

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Target Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1	Pembinaan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi	Jumlah peserta rapat koordinasi yang memahami kebijakan program pengembangan koperasi (org)	15	30	30	30	30
		Jumlah pengelola koperasi yang memahami prinsip-prinsip perkoperasian (kop)	15	30	45	60	75
		Jumlah pengelola koperasi peserta bimtek yang memahami administrasi usaha koperasi (org)	15	20	30	40	50
		Jumlah peserta bimtek akuntansi koperasi yang mampu membuat laporan keuangan koperasi (org)	0	15	30	45	60
		Jumlah pengelola koperasi peserta bimtek yang memahami tupoksi perangkat organisasi koperasi (org)	20	40	60	80	100
		Jumlah Kop. Yang menerima penghargaan (kop)	42	44	46	48	50
2	Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mampu mengembangkan permodalan dan usahanya (org)	5	10	15	20	25

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Target Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
		Jumlah usaha mikro yang dikembangkan permodalan dan usahanya (org)	292	342	392	442	492
		Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki jiwa kewirausahaan (org)	15	30	45	60	75
		Jumlah pengadaan sarana prasarana bagi usaha mikro (unit)	1	1	1	2	2
3	Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah jaringan klaster industri (unit)	1	1	1	1	1
		Jumlah sentra yang dibina (unit)	1	2	2	1	1
4	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang IKM	Jumlah penyusunan kebijakan industri (dok)	1	1	1	1	1
5	Promosi IKM dan Kerajinan	Jumlah pameran/promosi IKM kerajinan (kl)	3	4	4	4	4
6	Fasilitasi inovasi produk kerajinan	Jumlah produk inovasi kerajinan (produk)	3	3	3	3	3
7	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah revitalisasi pasar tradisional (unit)	3	6	8	10	12
8	Penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan	Jumlah PKL dan Asongan yang ditata (org)	0	60	120	180	240
9	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah barang (gabah) yang direksi gudangkan (ton)	500	1000	1200	1200	1500
		Jumlah pameran dan promosi dagang (kl)	2	2	2	2	2

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Target Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
10	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen /	Jumlah konsumen cerdas (memahami hak dan kewajibannya) (org)	50	100	150	150	150
		Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang (%)	50	60	70	80	90
11	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah kebutuhan bahan pokok yang dimonitor (item)	18	18	18	18	18
		Jumlah barang/produk tertentu yang diawasi (jenis)	2	2	2	2	2
		Jumlah tindak lanjut terhadap pelanggaran barang bersubsidi (pelanggaran)	3	6	9	12	15
12	Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha (org)	50	100	150	150	150

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel. 17
Indikator Kinerja Dinas Kopperindag yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2017)	TARGET CAPAIAN Setiap Tahun					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase Koperasi yang berkualitas.	33,33 %	35,00 %	36,66 %	38,33 %	40,00 %	41,66 %	41,66 %
2.	Persentase jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil.	488 Org	490 Org	492 Org	494 Org	496 Org	498 Org	498 Org
3.	Persentase kelompok pengrajin yang berkualitas.	4,7 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	23,5 5
4.	Persentase pertumbuhan barang dan jasa sector perdagangan.	00 %	0,50 %	1,00 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %	2,50 %

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala periode Tahun 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala untuk 5 (Lima) Tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan dan pelaksana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu untuk terjaminnya keberhasilan pelaksanaan Renstra Periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi Renstra, termasuk indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tanpa mengubah tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022.

Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga unit kerja dan kinerja pegawai.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Renstra Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dituangkan dalam bentuk laporan kinerja, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan keterangan penanggungjawab (LKP) Kabupaten Barito Kuala setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan.